

HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI ERA KONTEMPORER

Faridah¹, Suriati², Asriadi³, Mulkiyan⁴ Retna Dwi Estuningtyas⁵, Muhammad Yusuf⁶

¹²³⁴Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Sulawesi Selatan

⁵ Universitas Ibnu Chaldun , Jakarta

⁶Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad Makassar

¹E-mail: andifaridah81@gmail.com

Abstract

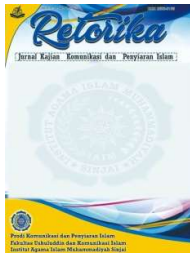
This article on Obstacles and Solutions in Political Communication in the Contemporary Era aims to examine the obstacles found in the implementation of political communication in the contemporary era and the solutions that can be taken to overcome or follow up on them. The research method used is qualitative with the type of library research, using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research by researchers, it was found that political communication is a type of communication that is seen based on the essence of its implementation. This communication has special characteristics, namely that it involves political actors, the messages conveyed are politically charged, or related to power, government and government policy. The political communication that researchers observed and found in its implementation encountered various obstacles. The types of political communication barriers that researchers found include technical barriers, semantic barriers, psychological barriers, physical barriers, organic barriers, status barriers, framework barriers, cultural barriers, and bureaucratic barriers. These obstacles play a very important role in the success of the political communication process that occurs so it is important to find solutions so that these obstacles can be overcome and minimized. Observing the many obstacles in political communication, researchers offer several solution concepts which generally consist of: Quality and quantity of political communication, Considering media openness, Comprehensive and coordinated communication strategy and planning. These four solutions can be applied and innovated according to the types of obstacles found.

Keywords: *obstacles, solutions, political communication*

Abstrak

Tulisan tentang Hambatan dan Solusi dalam Komunikasi Politik di era Kontemporer ini bertujuan untuk mengkaji tentang hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi komunikasi politik di era kontemporer dan solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi atau menindaklanjutinya. metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan bahwa Komunikasi politik merupakan salah satu jenis komunikasi yang dilihat berdasarkan esensi pelaksanaannya, komunikasi ini memiliki karakteristik khusus yakni melibatkan aktor-aktor politik, pesan yang disampaikan bermuatan politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik yang peneliti amati dan temukan dalam pelaksanaannya mendapatkan berbagai hambatan. Adapun jenis hambatan-hambatan komunikasi politik yang peneliti temukan meliputi hambatan teknis, hambatan semantik, hambatan psikologis, hambatan fisik, hambatan organik, hambatan status, hambatan kerangka berpikir, hambatan budaya, dan hambatan birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut sangat berperan dalam keberhasilan proses komunikasi politik yang terjadi sehingga penting untuk menemukan solusi agar hambatan tersebut dapat diatasi dan diminimalkan. Mencermati banyaknya hambatan dalam komunikasi politik, maka peneliti menawarkan beberapa konsep solusi yang secara garis besar terdiri atas: Kualitas dan kuantitas komunikasi politik, Mempertimbangkan keterbukaan media, Strategi dan perencanaan komunikasi yang komprehensif dan terkoordinasi. Keempat solusi tersebut dapat diterapkan dan diinovasikan sesuai dengan jenis hambatan yang ditemukan.

Kata Kunci: *hambatan, solusi, komunikasi politik, era kontemporer.*



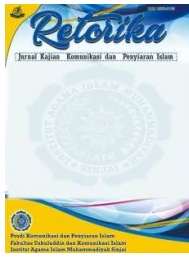
1. Pendahuluan

Komunikasi politik (*political communication*) merupakan komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik yang menyampaikan pesan-pesan politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Aminah, n.d.). Salah satu momen yang dianggap sarat dengan komunikasi politik adalah pada saat pilkada yang pada tahun 2021 diberitakan dilakukan sesuai jadwal seperti yang disampaikan pada salah satu berita yang menyatakan bahwa belum ada keputusan terkait penundaan pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 ke 2027 hingga kini. Isu mundurnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 baru sebuah wacana dan bahkan belum dibahas oleh pemerintah dan DPR (Ananda, n.d.).

Selain kampanye pada pemilu yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, komunikasi politik memiliki cakupan yang sangat luas karena menyangkut sampai pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Komunikasi politik diartikan sebagai suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang berupaya membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti. Pengertian tersebut menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sikap-sikap integratif (Harahap, n.d.).

Mewujudkan suatu jalinan komunikasi yang bermuara pada sikap-sikap integratif antara pemerintah dan masyarakatnya bukanlah suatu hal yang mudah, banyak factor yang mempengaruhi komunikasi politik yang berlangsung termasuk dalam hal penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pada kasus penerapan prokes sejak pandemi melanda. Di Era Pandemi, komunikasi politik pemerintah semakin intens dan hampir mewarnai seluruh media-media komunikasi dan informasi. Salah satu hal yang paling sering dikomunikasikan adalah kebijakan terkait protokol Kesehatan yang meskipun gencar disampaikan, namun pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah tersebut masih banyak ditemukan.

Pelanggaran terkait kebijakan pemerintah salah satunya diberitakan pada sebuah media bahwa di Solo Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mencatat ada 1.200 pelanggaran selama PPKM Level 4 terhitung mulai 9-16 Agustus 2021, temuan pelanggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode PPKM Level 4 sebelumnya yang hanya 900 pelanggaran (Aprian, n.d.).



Berita terkait pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah yang diuraikan di atas merupakan salah satu contoh betapa tidak mudahnya mewujudkan efektivitas komunikasi politik, sangat banyak faktor yang menjadi penghambat terwujudnya tujuan dari komunikasi politik. Namun meskipun memiliki banyak hambatan, umat manusia dianugerahi akal dan pikiran untuk mencari solusi terkait dengan komunikasi politik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh terkait dengan hambatan dan solusi dalam komunikasi politik agar komunikasi politik yang dilakukan lebih efektif mewujudkan tujuan pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan kajian pada dua hal utama yakni: bagaimana hambatan dan solusi dalam komunikasi politik?

2. Metode

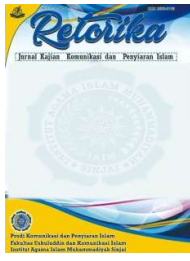
Penelitian ini adalah kajian pustaka dengan jenis penelitian kualitatif yakni melakukan penelusuran tentang hambatan dan solusi dalam komunikasi politik. Tulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Peneliti melakukan penelusuran lewat berita-berita di beberapa media terutama terkait dengan hambatan-hambatan komunikasi politik.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kontinyu sesuai dengan teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan data kemudian memilih data yang sesuai dengan yang peneliti kaji, melakukan pengorganisasian dan menempatkan data dalam penyajian sesuai dengan sistematika selanjutnya menyimpulkan data hasil penelitian yakni terkait solusi dakwah dalam menyikapi problematika ekonomi masyarakat kontemporer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hambatan dalam Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu dari cabang-cabang komunikasi yang khusus membahas tentang hal-hal yang bernuansa politik seperti perbincangan tentang pilkada, kampanye, kebijakan pemerintah dan pesan-pesan politik lainnya. Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam sebuah sistem politik, karena melalui komunikasi politik maka setiap elemen dalam sebuah sistem politik dapat terhubung antar satu dengan yang lain. Melalui komunikasi politiklah sebuah sistem politik dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Komunikasi politik menjadi kunci bagi efektivitas sebuah sistem politik termasuk dalam hal ini adalah sistem politik sebuah pemerintahan daerah (Muksin, n.d.).



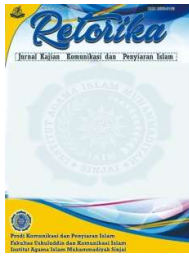
Kantaprawira mengemukakan bahwa komunikasi politik (*political communication*) berkontribusi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran antar golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah (Aminah, n.d.). Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi politik sangat dibutuhkan dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dan Nimmo menguraikan bahwa komunikasi politik mencakup beberapa aspek yaitu komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik dan akibat-akibat komunikasi politik. Di samping itu terdapat tujuan komunikasi politik;

- a. Belajar tentang politik (*political education*), kegiatan ini berlangsung sepanjang hidup manusia yakni melalui proses yang disebut sosialisasi politik, komunikasi politik dalam hal ini berperan untuk proses pembelajaran politik meliputi pertukaran informasi, Aktor politik memahami konstituen dan masyarakat dari pemberitaan media dan masyarakat memahami berpolitik lewat pemberitaan-pemberitaan politik, dan debat publik yang ditayangkan oleh media massa.
- b. Berpartisipasi dalam politik (*political participation*), hal ini meliputi: partisipasi dalam pemilihan umum, identifikasi dengan partai politik, pendaftaran untuk memilih, pengambilan bagian dalam kampanye, mengikuti informasi tentang politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, masuk organisasi kepentingan umum dan politik (Putra, n.d.).

Di samping tujuan tersebut, masih terdapat tujuan lain dari pelaksanaan komunikasi politik yaitu untuk membangun citra politik yang baik kepada khalayak. Adapun citra politik dibangun lewat desain informasi-informasi politik, dan disampaikan hingga diterima publik. Pesan politik yang telah didesain dapat disampaikan secara langsung atau dengan menggunakan media massa, disampaikan pada kegiatan-kegiatan formal maupun kegiatan non formal dan santai, baik pada diskusi serius maupun diskusi ringan (M.Tazri, n.d.).

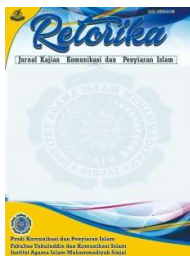
Komunikasi politik terdiri dari tiga unsur utama seperti dikemukakan oleh McNair yaitu organisasi politik, media, warga negara (*citizens*) (Putra, n.d.). Ketiga unsur komunikasi tersebut sangat berperan dalam kondusifitas ketatanegaraan. Namun di era digital seperti saat sekarang ini, diskursus perpolitikan di Indonesia, pola komunikasi yang terjadi menjadi tidak terstruktur dan tidak terkontrol. Pesan-pesan politik disampaikan secara serampangan dengan berbagai macam bentuk bahasa dan istilah. Mediumnya pun sudah cukup beragam, baik secara langsung maupun melalui



media massa atau media sosial. Dengan demikian kontrol terhadap pesan politik dan efeknya pun menjadi lepas dan tidak terkondisikan (M.Tazri, n.d.). Hal ini merupakan dampak sekaligus faktor dari tidak efektifnya proses komunikasi politik yang berlangsung.

Ketidakefektifan komunikasi politik disebabkan oleh berbagai hambatan atau berupa gangguan atau rintangan sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif atau tidak berlangsung seperti harapan komunikator dan penerima. Terdapat beberapa jenis gangguan atau rintangan atau hambatan komunikasi yang dapat dijadikan acuan untuk memahami hambatan dalam komunikasi politik mengingat bahwa perbedaan komunikasi politik dengan jenis komunikasi yang lain hanya terletak pada muatan pesan yang disampaikan, adapun jenis hambatan komunikasi politik tersebut meliputi:

- a. Hambatan teknis yaitu hambatan pada alat yang digunakan dalam berkomunikasi
- b. Hambatan semantik yaitu hambatan karena adanya kesalahan bahasa seperti banyaknya kata-kata asing, perbedaan bahasa, struktur bahasa yang membingungkan, dan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan karena perbedaan latar belakang budaya.
- c. Hambatan psikologis yaitu hambatan yang timbul karena adanya persoalan timbul yang dalam diri individu seperti curiga, sedih dan adanya gangguan kejiwaan
- d. Hambatan fisik yaitu hambatan yang disebabkan oleh kondisi geografis misalnya tempat yang jauh dan terpencil, hal ini meski sudah bisa diatasi oleh kehadiran media namun kekuatan jaringan (signal) kadang tetap jadi kendala.
- e. Hambatan Organik yaitu termasuk dari gangguan fisik manusia seperti ketidakberfungsian salah satu dari indera manusia seperti buta, tuli atau bisu.
- f. Hambatan status yaitu hambatan akibat jarak sosial di antara peserta komunikasi seperti antara atasan dan bawah, rakyat dan pemimpinnya.
- g. Hambatan Kerangka berpikir yaitu perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan di antaranya disebabkan oleh latar belakang pengalaman dan Pendidikan yang berbeda.
- h. Hambatan Budaya yaitu perbedaan norma, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi.
- i. Hambatan Birokrasi yaitu hambatan komunikasi yang disebabkan oleh struktur organisasi, banyaknya struktur atau jenjang pada birokrasi yang kerap kali menjadikan pesan tidak sampai pada jenjang terbawah (Cangara, 2017) .



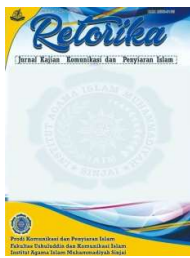
Disamping sembilan jenis kategori hambatan komunikasi yang diuraikan di atas, dapat juga ditemukan hambatan (*barrier*) jenis lain dalam praktik komunikasi politik yang masih dimediasi media tradisional yakni adanya praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi politik. Elemen-elemen komunikasi politik yakni media, elite dan publik tidak berada dalam ruang vakum. Masing-masing elemen memiliki fungsi kontrol yang akan mempengaruhi efek pesan yang dibangun dalam komunikasi politik. Orang-orang yang mengontrol adalah kelompok yang paling banyak menguasai sumber daya terutama medium (*channel*). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyampaikan opininya. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak terpenuhi karena penguasaan elite atas media massa di Indonesia. Pada akhirnya terjadi pelemahan peran media sebagai ruang partisipasi publik karena media lebih dipakai sebagai alat elite untuk mencapai kekuasaannya (Aminah, n.d.).

Mencermati pelaksanaan komunikasi politik memungkinkan bahwa setiap elemen dari komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik menjadi salah satu penghambat komunikasi politik seperti hambatan teknis yang ditemukan pada media komunikasi politik, hambatan semantik pada pesan dan persuasi politik, hambatan status, budaya, fisik, organik dan birokrasi pada komunikator dan khalayak politik, hambatan kerangka berpikir pada khalayak komunikasi. Hambatan komunikasi politik akan lebih kompleks terutama jika elemen politik hanya dilihat dalam lingkup yang lebih luas yakni pada tatanan organisasi politik, media, dan warga negara (*citizens*).

3.2. Solusi dalam Komunikasi Politik

Mencermati tujuan yang terkandung dalam komunikasi politik, maka para elit politik membutuhkan solusi atas hambatan politik yang ditemui dalam proses komunikasi politik yang dilakukan agar tujuan komunikasi politik dapat terwujud. Hal ini penting menjadi pertimbangan mengingat bahwa proses dan konsep politik selalu mewarnai perkembangan negara. Maju dan mundurnya negara tergantung dari iklim politik di negara tersebut tidak terkecuali Indonesia (Martono, 2018).

Iklim politik sangat erat kaitan dengan komunikasi politik, dan komunikasi politik menurut Cangara adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik (Wulansari, n.d.). Keterkaitan antara iklim politik, komunikasi politik, dan aktivitas politik menggambarkan perlunya

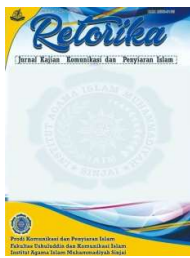


pembenahan di setiap elemen komunikasi politik yang mencakup komunikator politik baik dalam skala sebagai pemimpin atau penguasa dan jajarannya, pesan politik yang di antaranya mencakup kebijakan-kebijakan, persuasi politik yang berupa tindakan atau cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan politik, media politik yang berupa sarana yang dipergunakan, dan khalayak politik yang dapat diartikan sebagai warga negara atau rakyat. Mencermati keterkaitan antara elemen-elemen komunikasi tersebut, maka solusi komunikasi politik ditujukan pada tiap elemen yang mengalami hambatan.

Nimmo mengidentifikasi bahwa terdapat tiga jenis atau kategori politikus yaitu mereka yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (*part time*) (Aminah, n.d.). Komunikator politik sebagai salah satu dari elemen komunikasi politik dan merupakan pemain utama dalam komunikasi politik merupakan hal pertama dan utama yang membutuhkan solusi. Berdasarkan pendapat dari Nimmo diketahui bahwa komunikator politik adalah politikus sehingga pemimpin atau pemerintah yang lahir dari rahim partai politik adalah bagian dari komunikator politik, dengan kata lain komunikator politik mencakup di dalamnya pemerintah, penguasa atau pemimpin. Max Weber menyatakan bahwa pemimpin sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakatnya, kemajuan dan kemunduran dari suatu masyarakat ditentukan oleh perilaku para pemimpin (Nuruddin, 2020).

Besarnya pengaruh pemimpin (komunikator politik) pada perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa komunikator politik (pemimpin) semestinya memiliki kemampuan kekuasaan secara wajar, memiliki iman yang kuat dan keahlian yang dapat diandalkan. Hal ini dapat dimiliki dengan kemampuan berlapang dada menerima nasihat-nasihat atau kritikan-kritikan yang membangun dari para ulama, sebaliknya para ahli dan ulama diharapkan memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara jujur penyimpangan-penyimpangan yang dilihatnya pada pemimpin (Lopa, 2001). Kemampuan tersebut dapat mengikis hambatan psikologis berupa kecurigaan, hambatan kerangka pikir, dan hambatan status dalam komunikasi politik yang senantiasa berlangsung dalam proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

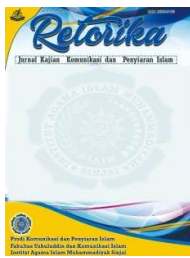
Pemimpin yang matang dengan kemampuan berkuasa yang wajar akan melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kebijakan itu dapat disosialisasikan dengan penggunaan media-media komunikasi dan informasi yang ada sesuai perkembangan zaman. Dewasa ini proses komunikasi termasuk komunikasi politik dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet, komunikasi politik dapat dilakukan dengan melibatkan jutaan orang dari seluruh penjuru dunia, tanpa



pertimbangan adanya hubungan yang bersifat pribadi. Khalayak yang tercipta oleh internet sangat khas yaitu sebuah masyarakat yang terbentuk oleh jaringan komputer, yang disebut masyarakat maya. Kehadiran media baru sangat memberikan keuntungan bagi komunikasi politik dibandingkan media massa lama. Pada media baru keterlibatan setiap orang dapat terjadi di era politik baru. Media baru mampu menawarkan ruang publik bagi politisi dan warga masyarakat untuk saling berinteraktif. Komunikasi politik yang dilakukan menurut McNair berpengaruh dengan pemanfaatan hubungan masyarakat dan media sebagai suatu bentuk strategi manajemen informasi yang berfungsi meyakinkan keberadaan partai politik mendapatkan publisitas maksimum dan meminimalkan penilaian negatif (Wulansari, n.d.). Hal tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa media sangat berperan dalam mengatasi hambatan dalam budaya, kerangka berpikir, fisik, status, dan birokrasi.

Perkembangan teknologi komunikasi dapat dianggap sebagai anugerah dalam dunia komunikasi politik era kontemporer, Internet telah membuka kanal komunikasi langsung antara publik (*citizen*) dengan elite politik yang semula harus dimediasi oleh institusi pers. Televisi sebagai media komunikasi tradisional sangat berbeda dengan internet, dan terdapat beberapa karakter yang mencakup ke duanya yang dapat dipertimbangkan yaitu; internet memiliki karakter terdesentralisasi (*decentralized*) sementara televisi tersentralisasi (*centered*). Karakter ini merubah proses komunikasi politik yang sebelumnya dari satu orang ke banyak orang (*one to many*) kini menjadi dari banyak orang ke banyak orang (*many to many*). Karakter ini mengurangi kekuasaan elite yang semula menjadi komunikan aktif, dan mengemansipasi publik yang kini menjadi publik aktif (Hasfi, n.d.).

Hal ini memungkinkan penyampaian kebijakan pemerintah yang lebih cepat dan akurat, di samping itu khalayak dapat lebih mengenali pemerintah atau komunikator politik lewat media, sehingga hambatan birokrasi, status, kerangka pikir, budaya dan fisik dapat diatasi melalui pendekatan media internet. Di samping itu keberadaan *cyberdemokrasi* (penggunaan internet untuk implementasi demokrasi) pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah memudahkan proses komunikasi politik di Indonesia. *Cyberdemokrasi* yaitu sebuah konsep yang melihat internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial dan memperluas partisipasi demokrasi. Menurut John Hartley, *cyberdemokrasi* adalah sebuah konsep optimis yang muncul sejak awal kehadiran internet. Asal mula konsep ini berkaitan dengan konsep awal dari *electronic democracy* (Wulansari, n.d.).

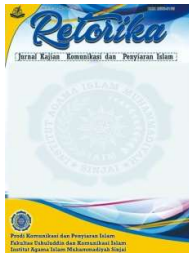


Perkembangan media komunikasi dan informasi juga sangat bermanfaat dalam hal kampanye dan iklan politik, hal ini sangat penting dipertimbangkan karena kampanye merupakan medium dimana partai bebas memperkenalkan ide-ide serta gagasan politik untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat (Bakti, 2017). suatu dan Kotler dan Roberto dalam Cangara menyampaikan bahwa kampanye merupakan suatu upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu). Berdasarkan defenisi tersebut maka setiap aktifitas kampanye setidaknya harus mengandung hal-hal yakni:

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah masyarakat sebagai sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.
- e. Sumber yang jelas sebagai penggagas, perancang, penyampai, dan penanggung jawab suatu produk kampanye, sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan setiap saat (Aminah, n.d.).

Seperti pelaksanaan kampanye, iklan politik di media sosial juga sangat dibutuhkan oleh komunikator politik karena iklan politik memainkan peran penting untuk merebut popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Sehingga pembentukan citra dari politikus (komunikator politik) dapat tercapai dengan penggunaan media, selanjutnya kegiatan yang tersistem dan kontinyu tersebut menghasilkan urutan capaian berupa diketahui, dikenal, disukai, didukung, dan dipilih dapat terwujud (Bakti, 2017).

Tujuan iklan dan kampanye politik yang menggiring opini masyarakat lewat media mencerminkan besarnya kontribusi media komunikasi dan informasi dalam hal ini media sosial dalam komunikasi politik. Termasuk dalam hal ini transparansi kebijakan pemerintah yang membutuhkan media agar dapat meraih kepercayaan dari masyarakat. Maka, selain penggunaan media massa untuk menginformasikan program pemerintah, saat ini diperlukan pula penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dapat menyentuh khalayak secara individu. Penggunaan media sosial saat ini turut pula mempengaruhi interaksi antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Media sosial merupakan teknologi yang bersifat praktis dan cepat sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh siapa pun. Karena sifat kepraktisannya, media sosial pun



menjadi pilihan bagi tokoh politik maupun pemerintah untuk menginformasikan pesan-pesan politiknya melalui media sosial (Wulansari, n.d.).

Indonesia telah memasuki era kemerdekaan berekspresi hal ini memicu munculnya pro dan kontra terhadap pesan komunikasi atau maksud pembicaraan di ruang publik. Hal ini dapat diantisipasi dengan budaya menjunjung tinggi nilai etika dan norma kebebasan dalam berkomunikasi bersama tentang kebebasan berpendapat (M.Tazri, n.d.).

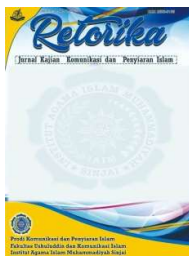
Mencermati banyaknya hambatan dalam komunikasi politik dan beragam solusi yang ditawarkan, berikut secara garis besar solusi dalam menangani hambatan-hambatan komunikasi politik yaitu:

- a. Kualitas dan kuantitas komunikasi politik yaitu meningkatkan kualitas atau kompetensi dari komunikator politik dan berusaha mempertahankan komunikasi yang sudah berlangsung termasuk dengan menggunakan media sosial sehingga rasa solidaritas dan persaudaraan antara elit politik atau komunikator politik dan komunikan atau khalayak politik dapat tetap terjaga dan gerjalin erat.
- b. Mempertimbangkan keterbukaan media, komunikator politik sebaiknya menjaga citra baik dan memperlihatkan unsur keteladanan sepanjang waktu karena kekuasaan media dalam menyorot persoalan pribadi dari komunikator politik tidak bisa diabaikan.
- c. Strategi dan perencanaan komunikasi yang komprehensif dan terkoordinasi, komunikator politik perlu membentuk tim dan mengorganisasikan serta mengatur kinerja tim sesuai kemampuan dan mempertimbangkan seluruh aspek dari elemen komunikasi politik (Cangara, 2017).

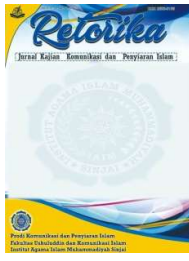
Solusi umum dalam menangani hambatan komunikasi tersebut di atas diharapkan menjadikan komunikasi politik semakin efektif sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara bisa semakin nyaman, tenteram, harmonis dan bahagia. Diharapkan segala hambatan dapatlah diatasi dengan berbagai solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan hambatan.

Penting untuk memahami bahwa setiap elemen-elemen politik memiliki hambatan masing-masing, namun meskipun demikian setiap elemen memiliki keterkaitan yang kuat sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Menyikapi hambatan-hambatan komunikasi dalam setiap elemen komunikasi politik, maka dibutuhkan solusi yang adaptif dan sesuai dengan hambatan dari tiap elemen tersebut. Berikut dapat dilihat table, elemen, hambatan dan solusi dalam komunikasi politik.

Tabel 2.1 Hambatan dan Solusi dalam Komunikasi Politik



| No | Elemen Komunikasi | Hambatan | Solusi | Ket |
|----|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | Komunikator politik, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan Psikologis 2. Hambatan Kerangka Pikir 3. Hambatan Status 4. Hambatan Birokrasi 5. Hambatan budaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi dan perencanaan komunikasi 2. Kualitas dan Kuantitas komunikasi 3. Mempertimbangkan aspek keterbukaan media | <p>Pemimpin harus memiliki kemampuan kekuasaan secara wajar, memiliki iman yang kuat dan keahlian yang dapat diandalkan, merawat sialturahmi serta penggunaan media sosial untuk kampanye dan iklan politik</p> |
| 2 | Pesan politik, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan semantic 2. Hambatan Budaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi dan perencanaan komunikasi 2. Kualitas dan Kuantitas komunikasi | <p>Memahami Komunikasi antar Budaya, penggunaan media sosial, perkuat jaringan</p> |
| 3 | Persuasi politik, | <ol style="list-style-type: none"> 3. Hambatan Fisik | | |
| 4 | Media komunikasi politik, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan Teknis 2. Hambatan Fisik | <ol style="list-style-type: none"> Strategi dan perencanaan komunikasi | <p>Manfaatkan semua jenis media</p> |
| 5 | Khalayak komunikasi politik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan Psikologis 2. Hambatan Kerangka Pikir 3. Hambatan Status 4. Hambatan Birokrasi Hambatan Organik 5. Hambatan Budaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi dan perencanaan komunikasi 2. Kualitas dan Kuantitas komunikasi | <p>Literasi Politik dan Penggunaan media sosial Penggunaan Bahasa Isyarat dan Juru Bicara Khusus</p> |



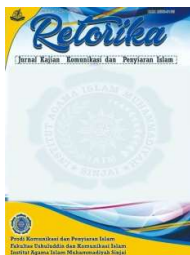
4. Simpulan

Komunikasi politik (*political communication*) merupakan komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik yang menyampaikan pesan-pesan politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah, dalam pelaksanaannya komunikasi politik kerap mendapatkan berbagai hambatan. Adapun jenis hambatan komunikasi politik meliputi hambatan teknis, hambatan semantik, hambatan psikologis, hambatan fisik, hambatan organik, hambatan status, hambatan kerangka berpikir, hambatan budaya, dan hambatan birokrasi.

Mencermati banyaknya hambatan dalam komunikasi politik dan beragam solusi yang ditawarkan, maka secara garis besar solusi dalam menangani hambatan-hambatan komunikasi politik terdiri atas Kualitas dan kuantitas komunikasi politik, Mempertimbangkan keterbukaan media, Strategi dan perencanaan komunikasi yang komprehensif dan terkoordinasi.

Daftar Pustaka

- Aminah. (n.d.). Peran Media Dalam Komunikasi Politik Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Barat,. *File:///C:/Users/ME/Downloads/521-943-1-SM.Pdf*.
- Ananda, P. (n.d.). *Mendagri Sebut Pilkada 2024 Sesuai Jadwal*. <https://mediaindonesia.com/Politik-Dan-Hukum/323115/Mendagri-Sebut-Pilkada-2024-Sesuai-jadwal>
- Aprian, D. (n.d.). *Satpol PP Catat 1.200 Pelanggaran PPKM Level 4 di Solo, Angkringan dan Warung Makan Mendominasi*. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/18/165639878/satpol-pp-catat-1200-pelanggaran-ppkm-level-4-di-solo-angkringan-dan-warung>,
- Bakti, A. F. dkk. (2017). *literasi Politik dan Kampanye Pemilu*. FIKOM UP Press.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, S. A. & M. A. (n.d.). Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik. *Jurnal Perspektif Komunikasi UMJ, Vol. 1*.
- Hasfi, N. (n.d.). Komunikasi Politik Di Era Digital. *Politika, Jurnal Ilmu Politik, Vol.10, No, April 2019*.
- Lopa, B. (2001). *masalah-masalah politik, hukum, sosial, budaya, dan agama; sebuah pemikiran*. Pustaka Sinar Harapan.
- M.Tazri. (n.d.). Cebong Dan Kampret Dalam Pespektif Komunikasi Politik Indonesia. *Jurnal Perspektif Komunikasi, Vol. 3 No*.
- Martono, N. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Rajawali Pers.
- Muhsin, N. N. (n.d.). Kredibilitas Komunikator Politik Basuki Tjahaya Purnama “Ahok” Sebagai Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,. *Jurnal PERSPEKTIF, Jurnal Perspektif Komunikasi UMJ, Vol. 1 No*.
- Nuruddin. (2020). *Komunikasi Politik dalam masyarakat tidak tulus*. Prenada.
- Putra, A. M. (n.d.). Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilu pada di Provinsi Banten 2011. *JIPSI, Volume III*.



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 6, No. 1, 2024

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN : 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/indeks.php/retorika>

DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

Wulansari, I. (n.d.). Artikulasi Komunikasi Politik Ridwan Kamil Dalam Media Sosial Twitter. *Ultimacomm, Volume VI*. file:///C:/Users/ME/Downloads/413-Anonymous Manuscript for Review-760-1-10-20160720.pdf.